

**BENTUK PESISIR PENGUASAAN LAHAN DALAM MASYARAKAT
FORMS OF COASTAL LAND TENURE IN SOCIETY**

PAPER



Oleh:

MAHARDIANSYAH

NRP: 59235115061

**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGELOLA SUMBERDAYA PERAIRAN
TAHUN AJARAN 2024/2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Mahardiansyah
NRP : 592351150611
Program Studi : Teknologi Pengelola Sumber Daya Perairan
Judul : Bentuk Penguasaan Lahan Dalam Masyarakat Pesisir

Menyetujui
Dosen Pengajar

Reynaldi Indra Syahputra, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan paper dengan judul Bentuk Penguasaan Lahan dalam Masyarakat Pesisir. Paper ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi masyarakat pesisir, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk penguasaan lahan yang terjadi di masyarakat pesisir, yang merupakan salah satu isu penting dalam kajian lingkungan dan sosial ekonomi. Saya menyadari bahwa penyusunan paper ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Reynaldi Indra Syahputra, M.Sc. selaku dosen mata kuliah sosiologi masyarakat pesisir, yang telah memberikan arahan, serta masukan selama proses penyusunan paper ini. Teman-teman dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materi selama proses penyusunan paper ini.

Saya juga menyadari bahwa paper ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, saya berharap semoga paper ini dapat memberikan manfaat, terutama dalam memperkaya wawasan mengenai penguasaan lahan di kawasan pesisir serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat.

Serang / 9 / 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAGA PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	1
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
BAB 2	3
PRIVATISASI LAHAN PESISIR.....	3
2.1 dampak sosial ekonomi	3
2.2 pengaruh terhadap ekosistem pesisir	4
2.3 konflik kepentingan	5
BAB 3	6
PENGUASAAN LAHAN BERBASIS LINGKUNGAN	6
3.1 zona wilayah pesisir	6
3.2 konservasi dan perlindungan ekosistem	7
3.3 pengelola risiko lingkungan	8
BAB 4	9
KESIMPULAN	9
4.1 kesimpulan	9
4.2 saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

ABSTRAK

Penguasaan lahan di wilayah pesisir memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan ekologis. Dalam masyarakat pesisir, bentuk penguasaan lahan bervariasi mulai dari sistem adat komunal, privatisasi, hingga pengelolaan oleh negara. Privatisasi lahan pesisir sering kali dikaitkan dengan tekanan pembangunan, terutama sektor pariwisata, yang menyebabkan perubahan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam. Sistem komunal yang berdasarkan adat sering bertentangan dengan regulasi pemerintah yang mengklaim tanah pesisir sebagai tanah negara, sehingga memunculkan konflik kepentingan. Selain itu, pendekatan pengelolaan lahan berbasis lingkungan, seperti zonasi pesisir dan manajemen berkelanjutan, semakin penting untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan konservasi lingkungan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk penguasaan lahan dalam masyarakat pesisir serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Penguasaan lahan, masyarakat pesisir*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penguasaan lahan merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pesisir. Masyarakat pesisir sering kali bergantung pada lahan dan sumber daya alam di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti perikanan, pertanian, dan pemukiman. Namun, cara penguasaan dan pengelolaan lahan di daerah pesisir dapat sangat bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang khas.

Secara historis, penguasaan lahan di kawasan pesisir seringkali terkait erat dengan hak adat dan tradisi lokal yang diwariskan turun-temurun. Di banyak komunitas pesisir, hak atas lahan tidak hanya ditentukan oleh hukum formal, tetapi juga oleh aturan adat yang mengatur pembagian dan penggunaan tanah. Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim, urbanisasi, dan investasi luar telah mempengaruhi dinamika penguasaan lahan, menambah kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk penguasaan lahan yang ada dalam masyarakat pesisir dan memahami bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal mempengaruhi pengaturan hak atas tanah. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di beberapa komunitas pesisir, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat pesisir beradaptasi dengan perubahan dan tantangan, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan dan adil.

1.2 TUJUAN

Tujuan Dalam Pembuatan Peper Ini Adalah

1. Menganalisis berbagai bentuk penguasaan lahan yang berlaku dalam masyarakat pesisir, baik yang bersifat tradisional maupun modern.
2. Mengeksplorasi dinamika konflik atau potensi ketegangan sosial terkait penguasaan lahan di wilayah pesisir.

BAB II PRIVATISASI LAHAN PESISIR

2.1 Dampak Sosial Ekonomi

Lahan Pesisir Sering Kali Membawa Perubahan Signifikan Terhadap Struktur Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Lokal Yang Tinggal Di Kawasan Tersebut. Dampak Sosial Dan Ekonomi Yang Terjadi Akibat Privatisasi Lahan Pesisir Dapat Bervariasi Tergantung Pada Pola Pengelolaan Dan Tingkat Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Tersebut salah satu dampak sosial utama dari privatisasi lahan pesisir adalah hilangnya akses masyarakat lokal terhadap lahan dan sumber daya alam yang telah mereka manfaatkan secara turun-temurun. Sebagaimana dibahas oleh **Duncan dan Hay (2010)** dalam jurnal mereka tentang pengelolaan sumber daya pesisir di Asia Tenggara, privatisasi lahan sering kali mengakibatkan masyarakat pesisir, terutama mereka yang miskin, kehilangan akses terhadap lahan yang mereka perlukan untuk mempertahankan kehidupan. Hilangnya akses ini tidak hanya menurunkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada pihak luar yang menguasai lahan. Dalam banyak kasus, masyarakat dipaksa untuk bekerja di sektor ekonomi yang baru (seperti pariwisata atau konstruksi) yang mungkin tidak sesuai dengan keterampilan mereka, sehingga mereka tetap berada di posisi ekonomi yang lemah.

Selain itu, privatisasi lahan pesisir sering kali memperburuk ketimpangan ekonomi. **Campling dan Colás (2018)** dalam artikel mereka tentang kapitalisme dan laut, menjelaskan bagaimana privatisasi sumber daya laut dan pesisir sering kali memberikan keuntungan besar kepada investor asing atau nasional yang memiliki akses modal besar. Sementara itu, masyarakat lokal hanya mendapatkan sedikit manfaat dari proses ini, bahkan sering kali justru tersingkir. Hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin besar, di mana masyarakat lokal menjadi semakin rentan secara ekonomi, sementara pemilik modal besar menikmati keuntungan dari pengembangan lahan pesisir yang mereka kuasai. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam distribusi pendapatan, tetapi juga dalam kepemilikan tanah, akses terhadap peluang ekonomi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan pesisir.



Gambar 1. Sosiologi masyarakat pesisir
(Sumber:Lautsehat.id)

2.2 Pengaruh Terhadap Ekosistem Pesisir

Privatisasi lahan pesisir dapat berdampak serius terhadap ekosistem pesisir, yang merupakan area ekologi yang sangat sensitif dan penting bagi keseimbangan lingkungan

A. Kerusakan Habitat Alami

Mangrove dan Terumbu Karang: Privatisasi sering kali melibatkan pembangunan infrastruktur seperti resort, hotel, atau perumahan yang dapat mengakibatkan penebangan mangrove dan rusaknya terumbu karang. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan tempat berkembang biaknya berbagai spesies ikan, sementara terumbu karang menyediakan habitat bagi berbagai jenis kehidupan laut. Pengrusakan ini menyebabkan hilangnya habitat kritis dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

B. Penurunan Kualitas Air

Polusi dan Erosi Pembangunan di lahan pesisir seringkali menyebabkan peningkatan polusi, baik dari limbah industri maupun limbah domestik, yang langsung mengalir ke laut. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air, mempengaruhi kehidupan laut seperti ikan, karang, dan organisme kecil yang bergantung pada air bersih. Selain itu, pembangunan di pantai seringkali menyebabkan erosi yang memperburuk kondisi perairan pesisir.

C. Gangguan Terhadap Kehidupan Laut

Hilangkan Area Pendaratan Penyu: Banyak lahan pesisir yang menjadi tempat pendaratan bagi spesies yang dilindungi seperti penyu laut. Privatisasi yang tidak mempertimbangkan ekologi dapat merusak area pendaratan dan menghancurkan siklus hidup penyu, karena area tersebut diubah menjadi area komersial.

D. Berubahnya Pola Pasang Surut dan Aliran Air

Konstruksi Infrastruktur Pembangunan jangka panjang di pesisir dapat memengaruhi pola alami pasang surut air laut dan aliran sungai. Struktur seperti dinding laut dan dermaga bisa mengubah pola sedimentasi, mempercepat abrasi, atau bahkan mengubah arah arus laut, yang bisa berdampak pada habitat laut yang lebih luas.

E. Kehilangan Fungsi Proteksi Alamiah

Abrasi dan Banjir Ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan vegetasi pantai lainnya memiliki peran penting dalam melindungi daratan dari abrasi, badai, dan banjir. Dengan adanya privatisasi yang menyebabkan kerusakan terhadap area ini, fungsi alami sebagai pelindung pantai dari gelombang besar dan badai semakin melemah, sehingga meningkatkan kerentanan kawasan pesisir terhadap bencana alam.

2.3 Konflik Kepentingan

Penguasaan lahan pesisir sering kali menimbulkan konflik kepentingan antara berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Konflik ini terjadi karena sumber daya pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering dianggap sebagai "open access," yang berarti siapapun bisa menggunakannya. Pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator dan fasilitator untuk menjembatani konflik ini, terutama dalam perencanaan zonasi wilayah pesisir. Contohnya, di Bangka Belitung, konflik terjadi antara eksploitasi timah dan upaya melindungi ekosistem pesisir



Gambar 2. Timah laut di perairan pulau bangka
(Sumber:Lautsehat.id)

A. Penguasaan Tradisional vs Penguasaan Komersial

Masyarakat Adat dan Nelayan Tradisional Di banyak wilayah pesisir, masyarakat adat atau nelayan lokal memiliki hubungan yang erat dengan lahan pesisir. Mereka seringkali memiliki hak adat atau akses tradisional untuk mengelola sumber daya laut dan pesisir, yang digunakan untuk mata pencaharian seperti penangkapan ikan, pengumpulan hasil laut, atau ritual budaya. Ketika lahan pesisir diprivatisasi atau disewakan untuk proyek komersial seperti resort atau properti perumahan, hak-hak tradisional masyarakat lokal sering kali diabaikan. Ini memicu konflik, karena masyarakat kehilangan akses ke lahan dan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka.

B. Konflik Antara Kepentingan Lingkungan dan Ekonomi

Konservasi vs Pembangunan: Beberapa wilayah pesisir memiliki nilai ekologi yang tinggi, seperti kawasan hutan mangrove atau terumbu karang yang menjadi area konservasi. Konflik muncul ketika kawasan ini dialihfungsikan untuk proyek ekonomi seperti pariwisata atau industri, yang sering kali mengorbankan nilai lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur besar di pesisir, seperti pelabuhan atau kawasan industri. Namun, masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada lingkungan yang lestari seringkali menentang proyek-proyek ini, karena berpotensi merusak ekosistem yang mereka andalkan.

BAB III PENGUASAAN LAHAN BERBASIS LINGKUNGAN

3.1 Zona Wilayah Pesisir

Zona pesisir adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Penguasaan lahan di zona ini harus memperhatikan dampak lingkungan seperti erosi, kenaikan permukaan laut, dan kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Strategi yang sering diterapkan adalah pendekatan *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM), yang mengutamakan keterpaduan antara perlindungan ekosistem, pemanfaatan ruang, serta keterlibatan masyarakat lokal.

A. Zonasi Wilayah

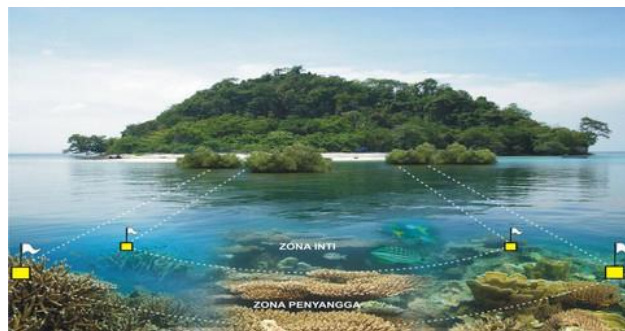
Membagi wilayah pesisir berdasarkan daya dukung lingkungan, misalnya zona konservasi, zona pemanfaatan terbatas, dan zona pemukiman.

B. Pengelolaan Risiko Bencana

Pengaturan tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana alam seperti tsunami, abrasi, atau kenaikan air laut.

C. Konservasi Ekosistem

Perlindungan terhadap ekosistem kritis seperti hutan mangrove, yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan habitat penting bagi berbagai spesies.



Gambar 3. Zona wilayah pesisir
(batamtoday.com)

3.2 Konservasi Dan Perlindungan Ekosistem

untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem alami yang berperan penting dalam mendukung kehidupan, baik secara ekologis maupun ekonomis. konservasi laut melibatkan berbagai ekosistem, termasuk terumbu karang, mangrove, dan lamun yang memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Strategi konservasi biasanya melibatkan pengelolaan berbasis komunitas, pembentukan kawasan konservasi laut, serta rehabilitasi ekosistem yang rusak

A . Perlindungan Habitat

Memastikan habitat alami, seperti hutan, padang lamun, terumbu karang, dan lahan basah, tetap utuh dan berfungsi. Habitat ini menjadi tempat hidup bagi banyak spesies dan menjaga kestabilan ekosistem. Wilayah pesisir seperti hutan mangrove dilindungi untuk mencegah abrasi dan menyediakan ekosistem penting bagi spesies laut.

B. Konservasi Sumber Daya Alam

Pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral. Hal ini mencakup pemanfaatan yang efisien dan ramah lingkungan agar sumber daya tetap tersedia untuk generasi mendatang serta Pengelolaan ikan dan kelautan bagian dari upaya ini, khususnya di zona pesisir yang rawan eksploitasi.

D. Pengelolaan Risiko Bencana

Mengelola dampak dari perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir, gelombang pasang, dan kenaikan permukaan laut. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana serta perlindungan ekosistem seperti mangrove yang berfungsi sebagai penahan alami dari tsunami dan badai.



Gambar 4. Konservasi perlindungan ekosistem

[\(https://ksdae.menlhk.go.id/\)](https://ksdae.menlhk.go.id/)

3.3 Pengelola Risiko Lingkungan

Pengelola risiko lingkungan adalah profesi yang fokus pada identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatan manusia. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran ini

A. Identifikasi Risiko

Penilaian Risiko Menganalisis potensi bahaya lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan industri, pembangunan, atau kegiatan manusia lainnya. Inventarisasi Sumber Risiko Mengidentifikasi sumber-sumber risiko yang dapat memengaruhi kualitas udara, air, tanah, dan ekosistem.

B. Penilaian dan Evaluasi

Evaluasi Dampak Lingkungan (AMDAL) Menilai dampak potensial terhadap lingkungan dari proyek atau kebijakan. Analisis Risiko: Menilai kemungkinan dan dampak risiko lingkungan, serta menentukan prioritas penanganan.

C. Pengembangan Strategi Pengelolaan

Rencana Mitigasi Mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko lingkungan, termasuk pencegahan polusi dan pengelolaan limbah. Kebijakan dan Prosedur: Membuat kebijakan dan prosedur untuk mematuhi regulasi lingkungan dan standar industri.



Gambar 5. Konservasi perlindungan ekosistem
(<https://identitasunhas.com/>)

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Bentuk penguasaan lahan pesisir dalam masyarakat mencerminkan keragaman yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan. Penguasaan ini dapat berupa kepemilikan pribadi, semua ini tergantung pada tradisi lokal dan kebijakan pemerintah. Konflik sering muncul antara pemangku kepentingan, seperti antara komunitas lokal dan pengembang, yang disebabkan oleh tidak pastian hukum, perbedaan kepentingan, atau perubahan lingkungan. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan inklusif sangat penting untuk mengelola penguasaan lahan pesisir secara efektif, sementara pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan lokal serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

4.2 Saran

Bentuk penguasaan lahan pesisir dalam masyarakat mencerminkan keragaman yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan. Penguasaan ini di sebabkan oleh tidak pastian hukum, perbedaan kepentingan, atau perubahan lingkungan.

Oleh karena itu,. Ke depannya, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melakukan dialog yang intensif dengan komunitas lokal untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Implementasi sistem pemantauan yang transparan dan partisipatif juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan lahan pesisir dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Sara, La. Pengelolaan Wilayah Pesisir. Ed. 1. Cet. 2. (Bandung: Alfabeta, 2014). Waskito dan Hadi Arnowo. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Ed. 1. (Jakarta: Kencana, 2017).*
- Dahuri, Rokhmin, 2004, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut Secara Terpadu, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita*
- Darmin, H.H., Budi, S., Muhammad, A., Susvia, D.K., Fasih, V.S. 2015. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Di Desa Pangumbahan Kabupaten Sukabumi. *J Sos Pedesaan. 3(3):101-105.*
- Bohnsack, J. A., & Ault, J. S. (1996). "Management of coral reef fisheries: A review of scientific approaches and management options." *Marine Pollution Bulletin, 32(12), 936-950.*
- Hino, M., & Hayashi, K. (2006). "Land use patterns and their impact on coastal resources: A case study from Japan." *Journal of Environmental Management, 79(3), 290-301.*